

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia modern dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat membuat setiap perusahaan harus berusaha mengikuti persaingan yang kompetitif, termasuk perbankan. Kemunculan bank syariah mempunyai peranan yang cukup berarti. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan bekerja sama dengan bank. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk modal usaha maupun kebutuhan konsumtif. Dengan berbagai macam produk dan fasilitas yang tersedia di bank dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Harahap, 2016:113)

Kemunculan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, tepatnya pada 1 November 1991. Bank tersebut resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 setelah diberlakukannya Undang Undang No.7 Tahun 1992. Istilah yang dipakai adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil. Kemudian Undang Undang tersebut diubah dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang Undang tersebut disebutkan bahwa terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. (Hasyim, 2016:11)

Kelahiran Bank Muamalat diikuti oleh Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang saat ini diubah dengan nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS juga ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama pada lingkup skala ekonomi kecil. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang dimaksud tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha diluar kegiatan yang ditetapkan oleh Undang Undang. (Indrarini, 2017:53)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keuangan dengan ketentuan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan terhindar dari unsur riba. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. BPRS juga mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Diketahui dari data statistika Otoritas Jasa Keuangan yang di publikasikan per

Desember 2018 jumlah BPRS mencapai 167 BPRS di seluruh Indonesia. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Beberapa fungsi penting dari laporan keuangan bagi setiap lembaga keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, perubahan posisi keuangan serta membantu entitas dalam pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi Lembaga keuangan tersebut, maka Lembaga keuangan harus membuat laporan keuangan secara rutin setiap akhir periode. Penyajian laporan keuangan tersebut haruslah akurat, mudah dipahami dan dapat dibandingkan. (Tamon 2016:585)

Pihak manajemen BPRS harus memperhatikan tingkat kesehatan keuangan untuk menjaga perkembangan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu BPRS perlu menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang dibuat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar yang digunakan dalam pelaporan keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan SAK ETAP pada tahun 2009 dan berlaku pada BPRS mulai per 26 Maret 2015 setelah adanya penetapan tanggal dari SOJK Nomor 9/SEOJK.03/2015. SAK ETAP diperuntukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. (Sari, 2017:105)

Namun menurut penelitian terdahulu masih ada beberapa BPR yang pengungkapan dan penyajian laporan keuangannya sudah berpedoman pada SAK ETAP, tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan pada SAK ETAP sepenuhnya. Seperti penelitian terdahulu yang berjudul “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) Manado”. Ditulis oleh Jovan R. Tamon, Sondakh, dan Mawikere pada tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam penyajian laporan keuangan BPR Cipta Cemerlang Indonesia (CCI) Manado masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak diterbitkan, sementara menurut SAK ETAP dan PBI wajib diterbitkan, seperti persediaan, properti investasi, kewajiban diestimasi, dan masalah tenaga kerja.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada PT. BPR Ganto Nagari 1945”. Ditulis oleh Immu Puteri Sari dan Dwi Nova Azana pada tahun 2017. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP. Terdapat tiga pokok kebijakan akuntansi yang berlaku dalam neraca adalah tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pos pos yang ada pada neraca. Namun dari hasil pernyataan dari orang bagian keuangan PT. BPR Ganto Nagari 1945 terdapat 126 pernyataan yang diantaranya ada beberapa pernyataan yang belum diterapkan pada PT. BPR Ganto Nagari 1945 yang terdiri atas 6 item pengakuan, 4 item penyajian dan 5 item pengungkapan.

Penelitian ini memilih objek BPRS Madina Mandiri Sejahtera karena setelah dilakukan observasi standar yang digunakan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam penyajian laporan keuangannya masih menggunakan PAPSI 2013, sedangkan peraturan yang terbaru dan efektif bagi BPRS adalah SAK ETAP 2015. Perbedaannya yaitu PAPSI 2013 merupakan aturan yang dapat digunakan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (UUS), dan SAK ETAP 2015 merupakan aturan yang dikhususkan untuk BPRS. (SAK ETAP 2015)

BPRS Madina Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang mendapat kepercayaan dari masyarakat terutama pada skala ekonomi menengah kebawah. Kepercayaan inilah yang membuat masyarakat berinvestasi ataupun melakukan pembiayaan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Penilaian oleh masyarakat terhadap suatu bank dapat dilihat dari informasi laporan keuangan yang disajikan. Agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga maka perlu adanya pelaporan keuangan yang simple dan mudah dipahami. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia adalah SAK ETAP. BPRS menggunakan SAK ETAP dan bukan PSAK karena jangkauan nasabah BPRS masih dalam lingkup masyarakat kecil dan mikro. Oleh sebab itu dibutuhkan susunan laporan keuangan yang mudah dan dapat dipahami serta tidak memberatkan pihak perusahaan. (Wijayanti, 2018:9)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kesesuaian Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus BPRS Madina Mandiri Sejahtera)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas dapat diketahui rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi dalam pengungkapan dan penyajian pada Laporan Keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana kesesuaian terhadap SAK ETAP dalam pengungkapan dan penyajian pada Laporan Keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
3. Bagaimana kualitas Laporan keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, dengan berdasarkan masalah masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam pengungkapan dan penyajian pada Laporan Keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kesesuaian terhadap SAK ETAP dalam pengungkapan dan penyajian pada Laporan Keuangan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

3. Untuk mengetahui kualitas Laporan keuangan yang disusun BPRS Madina Mandiri Sejahtera

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi bagi para ahli perbankan syariah khususnya BPRS untuk lebih memperhatikan dalam hal pencatatan akuntansi pada laporan keuangannya.
- b. Mengetahui gambaran umum SAK ETAP.
- c. Menjadi pembanding antara teori SAK ETAP dan praktik lapangan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan dalam transaksi-transaksi yang ada dan dapat mengetahui penerapan SAK ETAP pada praktik lapangan di BPRS.
- b. Bagi lembaga untuk membantu dalam praktiknya agar lebih sesuai syariah dan sesuai dengan standar SAK ETAP mengenai transaksi akuntansi.
- c. Bagi akademisi sebagai informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.